

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MANADO

Rencana Aksi Kegiatan (Revisi)

Tahun 2020-2025



Alamat: Jl. Raya Koka Lingk. II Kel. Lapangan Kec. Mapanget, Kota Manado
email : kkpmanado_celebes@yahoo.com
Web : <https://kkpmanado.com>
Tlp : (0431) 811104

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, atas Berkat dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado Tahun 2022-2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi Kegiatan Revisi BKK Kelas I Manado ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan manajemen pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah kerja dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan, pemantauan dan pelaporan.

Dalam Rencana Aksi Kegiatan (revisi) BKK Kelas I Manado untuk tahun 2022-2025, kami merasakan masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dukungan manajemen. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK Revisi BKK Kelas I Manado tahun 2022-2025 dapat dijadikan dasar dan acuan oleh seluruh Substansi dan Sub. Bag. ADUM yang ada di wilayah kerja dalam melaksanakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas manajemen program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Diharapkan Rencana Aksi Kegiatan Revisi tahun 2022-2025 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan Revisi Tahun 2022-2025 ini, semoga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di wilayah Kerja BKK Kelas I Mando.

Manado, Januari 2025

Kepala



dr. Pingkan M. Pijoh.,MPHM
NIP. 197102082001122003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Tantangan.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS.....	5
A. Visi dan Misi	5
B. Tujuan Strategis	6
C. Sasaran Strategis.....	7
D. Indikator Kinerja	8
E. Arah Kebijakan dan Strategis	10
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN	13
A. Kerangka Logis.....	13
B. Rencana Kegiatan	15
C. Kerangka Kelembagaan	17
D. Kerangka Regulasi	18
E. Kerangka Pendanaan	19
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM	21
A. Pemantauan	21
B. Evaluasi.....	21
C. Pengendalian	21
BAB VI PENUTUP	22
A. Lampiran 1. Kerangka Logis Program.....	22
B. Lampiran 2. Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan.....	23
C. Lampiran 3. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber Data	24
D. Lampiran 4. Matriks Strategi Pencapaian Program.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja.....	15
Tabel 2. Kerangka Pendanaan.....	19
Tabel 3. Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan	23
Tabel 4. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber Data	24
Tabel 5. Matriks Strategi Pencapaian Program	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum.

Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Manado 2022-2025 merupakan Rencana Aksi Kegiatan (revisi) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado Tahun 2022 – 2025 dengan beberapa perubahan-perubahan skala prioritas sasaran, peningkatan kemampuan, aksesibilitas, dan percepatan terhadap beberapa sasaran program.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2016/2024 Tentang wilayah kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan memiliki 10 wilayah kerja yaitu: Kantor Induk, Bandara Sam Ratulangi, Wilker Pelabuhan Laut Manado, Wilker Pelabuhan Laut Likupang, Wilker Pelabuhan Laut Siau, Wilker Pelabuhan Laut Tahuna, Wilker Pelabuhan Laut Petta, Wilker Pelabuhan Laut Melonguane, Wilker Pelabuhan Laut Lirung, Wilker Pelabuhan Laut Marore dan Wilker Pelabuhan Laut Miangas.

Pembangunan kesehatan juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado memiliki SDM sebanyak 84 (Delapan Puluh Empat) orang pada Tahun 2025 dengan rincian 56 (Lima Puluh Enam) orang ASN dan 28 (dua puluh delapan) orang tenaga Non ASN. Jika dilihat dari jenis kelamin maka terdapat 43 (Empat Puluh Tiga) orang laki-laki dan 41 (Empat Puluh Satu) orang perempuan. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan ada 7 (tujuh) orang S2, 23 (dua puluh tiga) orang S1 Kesehatan,

36 (tiga puluh enam) orang D3, 17 (Tujuh Belas) orang SMA dan 1 (Satu) orang SMP.

Bila dilihat dari kelembagaan berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan yang selanjutnya disebut BKK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Di dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan bahwa BKK terdiri dari Subbag ADUM, Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun ruang lingkup tugas masing-masing Subbag/Substansi di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1 Subbag ADUM mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan;
- 2 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 3 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BKK.
- 4 Koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 5 Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

B. Potensi dan Tantangan

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di pintu masuk negara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2025 Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan pada tingkat satuan kerja menjabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Manado sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 -2025.

Awal tahun 2020 terjadi krisis kesehatan akibat pandemi wabah SARS-CoV-2 sehingga Presiden RI. mengeluarkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang berdampak pada lalu lintas orang dan alat angkut di seluruh negara di dunia hal ini terkait dengan upaya cegah tangkal faktor resiko di pintu masuk negara dan wilayah oleh Kantor Kesehatan Kelas I Manado yang telah ditetapkan semula kemudian dilakukan revisi kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk optimalisasi penanggulangan wabah Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19).

Potensi dan tantangan pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi input dalam menentukan rencana pelaksanaan program bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Manado dalam upaya cegah tangkal faktorresiko kesehatan di Pintu Masuk Negara atau wilayah.

Tantangan yang tidak dapat diabaikan adalah dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, penyakit yang baru muncul (new emerging diseases). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging diseases), Tantangan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di wilayah kerja BKK Kelas I Manado adalah

mobilitas warga Sulawesi Utara saat perayaan Natal dan Tahun Baru serta dibukanya kembali iven nasional Tomohon International Flower Festival (TIFF) yang dilaksanakan setiap bulan Agustus faktor resiko yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat, dan penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1 Tugas

BKK Kelas I Manado mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara.

2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas BKK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dibidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi dibidang kekarantinaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi dan kerja sama dibidang kekarantinaan kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kekarantinaan kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi BKK.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJP-K 2005-2025, pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan melaksanakan berbagai macam cara dengan pelaksanaan transformasi kesehatan, di mana transformasi kesehatan ini di jabarkan dalam 6 pilar yakni, transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan dan teknologi kesehatan.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2024-2029 yaitu bersama indonesia maju menuju indonesia emas 2045. Terdapat delapan visi presiden, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

Selaras dengan visi Ditjen Penanggulangan Penyakit, Balai Kekearifan Kesehatan menjabarkan visi Balai Kekearifan Kesehatan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dibangun empat pilar yakni:

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Teknologi
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya program Ditjen Penanggulangan Penyakit telah menetapkan misi tahun 2022-2025 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Data Manusia.

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2025 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan

6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen PENANGGULANGAN PENYAKIT maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen PENANGGULANGAN PENYAKIT pada tahun 2020-2025 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PENANGGULANGAN PENYAKIT, maka BKK telah menetapkan tujuan strategis BKK yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2025.**

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen PENANGGULANGAN PENYAKIT yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis BKK telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen PENANGGULANGAN PENYAKIT yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2025. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategiskendalanya faktor risiko penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja BKK Kelas I Manado pada RAK awal tahun 2020-2025 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator BKK Kelas I Manado Tahun 2020-2025

No	Indikator Tahun 2020-2025 (semula)	Indikator Tahun 2022-2025 (revisi)
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
4	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
		Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti.
		Persentase realisasi anggaran

Tahun 2022-2025, BKK Kelas I Manado telah menetapkan 9 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara

Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini

- factor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh BKK.
 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.
 4. Nilai kinerja anggaran
Nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai kinerja anggaran satker diperoleh melalui aplikasi e-monev SMART DJA.
 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja BKK dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
 6. Kinerja implementasi WBK satker
Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem

- manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.
 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti.
 9. Persentase Realisasi Anggaran
Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen PENANGGULANGAN PENYAKIT merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen PENANGGULANGAN PENYAKIT yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

BKK Kelas I Manado telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program PENANGGULANGAN PENYAKIT yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan BKK Kelas I Manado tersebut dapat dicapai melalui

strategi sebagai berikut:

1. Koordinasi pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
2. Pelayanan kesehatan haji
3. Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan
4. Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk
5. Pelatihan kesehatan
6. Layanan hukum
7. Layanan prasarana internal
8. Layanan manajemen SDM
9. Layanan perencanaan dan penganggaran

Untuk mencapai indicator indeks deteksi dini factor risiko penyakit dilakukan strategi sebagai berikut:

1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
3. Indeks pengendalian di pintu masuk negara
4. Nilai Kinerja Anggaran
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6. Kinerja Implementasi WBK Satker
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi

Strategi per indicator (ada 7 indikator)

1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara

Upaya mengukur kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), diperoleh dari pengukuran 4 parameter yakni persentase orang, alat angkut dan barang serta lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

Cara perhitungan :

Nilai empiris dibagi (nilai skor maksimal – nilai skor minimal).

2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, dengan upaya mengukur kinerja pengendalian

faktor risiko diwilayah kerja BKK Kelas I Manado.

Definisi Operasional : Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

Cara perhitungan:

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan di kalikan 100 %.

3. Indeks pengendalian di pintu masuk negara

Upaya mengukur status pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dengan parameter perhitungan:

- a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80 %.
- b. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks pinjal ≥ 1
- c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles < 1
- d. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2
- e. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2
- f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
- g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1
- h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
- i. Persentase lokus TPM laik Hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
- j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

4. Nilai Kinerja Anggaran

5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Upaya mengukur kinerja pelaksanaan anggaran BKK Kelas I Manado dengan parameter Revisi Dipa, Deviasi Hal III Dipa, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi

SPM dan Capaian Output.

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

Upaya mengukur kinerja implementasi WBK satker dengan nilai assesment minimal 75

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi

Upaya menghitung persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya berdasarkan bukti data dukung berupa, sertifikat/surat tugas/laporan.

Untuk mencapai indicator indeks deteksi dini factor risiko penyakit dilakukan strategi sebagai berikut:

Strategi per indicator (ada 7 indikator)

1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara

Upaya mengukur kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), diperoleh dari pengukuran 4 parameter yakni persentase orang, alat angkut dan barang serta lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

Cara perhitungan :

Nilai empiris dibagi (nilai skor maksimal – nilai skor minimal).

2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, dengan upaya mengukur kinerja pengendalian faktor risiko di wilayah kerja BKK Kelas I Manado.

Definisi Operasional : Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

Cara perhitungan:

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan di kalikan 100 %.

3. Indeks pengendalian di pintu masuk negara

Upaya mengukur status pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dengan parameter perhitungan:

- a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80 %.
- b. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks pinjal ≥ 1
- c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles < 1
- d. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2
- e. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2
- f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
- g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1
- h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
- i. Persentase lokus TPM laik Hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
- j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

4. Nilai Kinerja Anggaran

5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Upaya mengukur kinerja pelaksanaan anggaran BKK Kelas I Manado dengan parameter Revisi Dipa, Deviasi Hal III Dipa, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

Upaya mengukur kinerja implementasi WBK satker dengan nilai assesment minimal 75

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi

Upaya menghitung persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya berdasarkan bukti data dukung berupa, sertifikat/surat tugas/laporan.

8. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti.

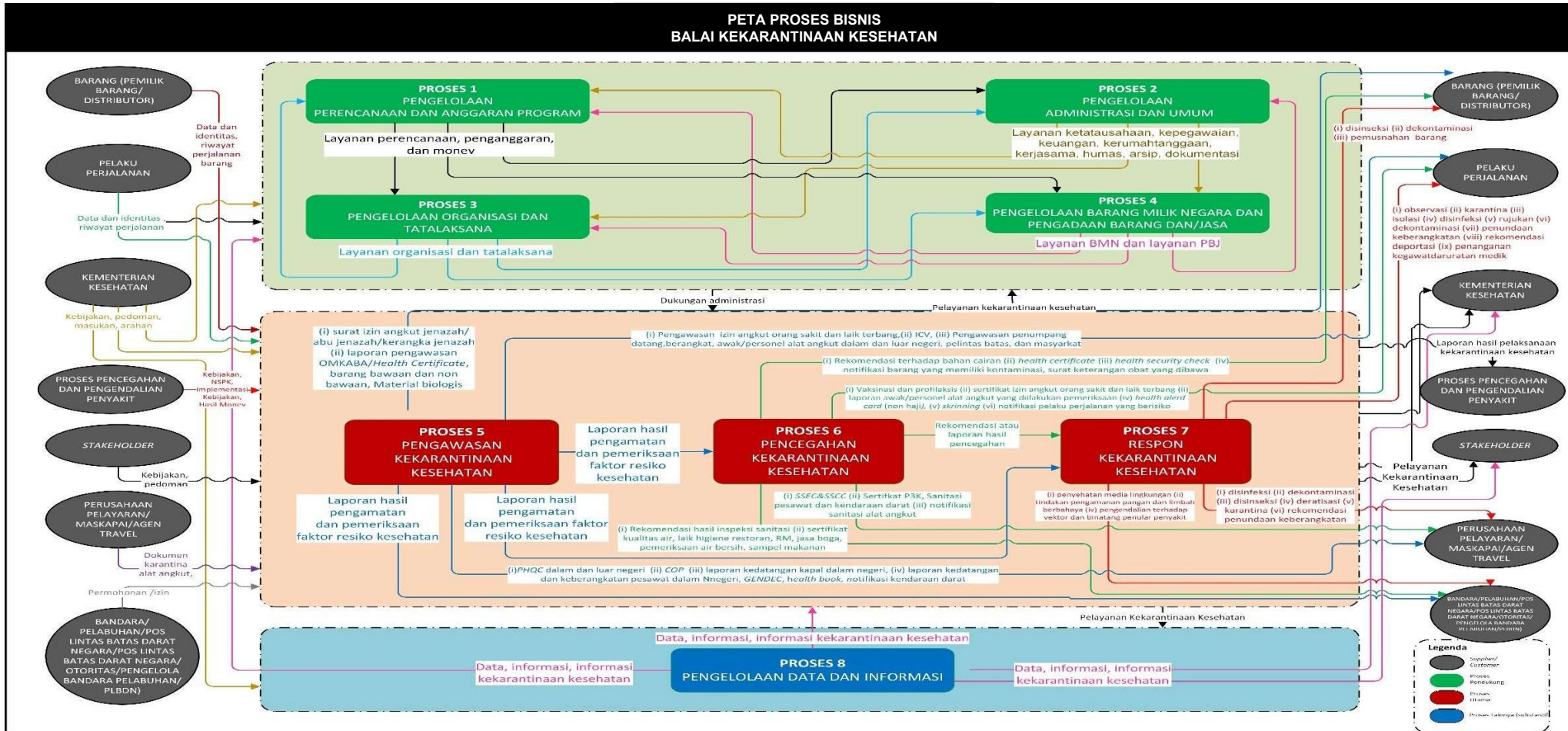
Melakukan koordinasi internal antara kepala kantor dan seluruh pegawai, rapat dengan seluruh pegawai. Koordinasi dengan tim yang sudah penunjukkan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

9. Persentase Realisasi Anggaran.

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis Balai Kekarantinaan Kesehatan



B. Rencana Kegiatan

Tabel 1. Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan/Indikator or Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah							
1	Indeks deteksi dini factorrisiko penyakit di pintu masuk negara	1.646.860	1.915.806	0.8	0.99	0.99	0.99
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang dan Lingkungan	90%	95%	97%	97%	97%	97%
3	Indek pengendalian dipintu masuk	85%	90%	95%	0.90	0.90	0.90
4	Nilai Kinerja Anggaran	80	83	85	86	86	86
5	Nilai Indikator Kinerja Anggaran	80%	93	93	93	93	93
6	Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker	70	72	75	76	76	76
7	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	45%	60	80%	80%	80%	81%
8	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	-	-	92.5%	92,5%	-	-
9	Persentase realisasi anggaran	-	-	95%	95%	96%	96%

Kegiatan

Untuk mencapai target indikator indeks pengendalian deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara dilakukan kegiatan yakni:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan, terdiri dari kegiatan :
 - a. Pemeriksaan/penapisan orang meliputi : pemeriksaan /penampisan penumpang tiba dan berangkat, crew/abk tiba dan berangkat, situasi khusus (hari raya, event nasional- internasional dan TKA), Penumpang sakit, Laik terbang, ICV, pasien rujukan, surat keterangan berbadan sehat, Screening Tb dan Screening HIV, Vaksinasi.
 - b. Pemeriksaan alat angkut meliputi : pemeriksaan kesehatan/kekarantinaan alat angkut dibuktikan dengan dokumen kesehatan alat angkut berupa PHQC, GENDEC, Pemeriksaan sanitasi pesawat.
 - c. Pemeriksaan barang meliputi : pemeriksaan jenazah / Abu/ Kerangka
 - d. Pemeriksaan lingkungan meliputi : Pemeriksaan lingkungan bandara atau pelabuhan terkait pemeriksaan gedung / tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan, inspeksi sarana penyediaan air bersih dan rekapitulasi hasil survey vektor.
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, terdiri dari :
 - a. Faktor risiko yang dikendalikan pada orang yaitu:
 - Penumpang positif, ibu hamil >32 minggu
 - b. Faktor risiko yang dikendalikan pada barang yaitu:
 - Pengemasan yang tidak sesuai prosedur
 - c. Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut yaitu:
 - Ditemukan penumpang positif pada alat angkut dan desinfeksi alat angkut.
 - d. Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan yaitu:
 - Lokasi yang telah dikendalikan sampai memenuhi syarat.
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, terdiri dari:
 - a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%.
 - b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal < 1
 - c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva Anopheles
 - d. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoak < 2

- e. Persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lahat < 2
 - f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
 - g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer = 0
 - h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
 - i. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
 - j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis
4. Nilai Kinerja Anggaran, dinilai dari :
 - a. Penyerapan anggaran.
 - b. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 - c. Capaian keluaran
 - d. Efisiensi
 5. Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Hal III DIPA
 - c. Penyerapan Anggaran
 - d. Belanja Kontraktual
 - e. Penyelesaian Tagihan
 - f. Pengelolaan UP dan TUP
 - g. Dispensasi SPM
 - h. Capaian Output
 6. Kinerja implementasi WBK satker, dinilai dari:
 - a. Self Assesment
 7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL, terdiri dari kegiatan :
 - a. Pendidikan
 - b. Pelatihan klasikal
 - c. Pelatihan non klasikal
 8. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti.
 9. Persentase Realisasi Anggaran.

D. Kerangka Kelembagaan

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I MANADO



E. Kerangka Regulasi

1. Undang undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2025;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Keekarantinaan Kesehatan;

F. Kerangka Pendanaan

Tabel 2. Kerangka Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator/Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)					
		2020	2021	2022 (pagu existing)	2023 (pagu indikatif)	2024	2025
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	880.901.000	2.729.812.000	1.574.572.000	1.600.000.000	1.725.000.000	866.222.000
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang dan lingkungan	220.245.000	449.701.000	314.484.000	340.000.000	400.000.000	815.202.000
3	Indek pengendalian dipintu masuk	220.206.000	442.669.000	1.147.417.000	1.160.000.000	1.190.000.000	144.482.000
4	Nilai Kinerja Anggaran	5.064.754.000	203.624.000	15.763.809.000	24.700.000.000	19.000.000.000	229.444.000
5	Nilai Indikator Kinerja Anggaran	4.220.000.000	13.664.687.000	18.973.537.000	24.700.000.000	19.000.000.000	131.026.000
6	Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker	629.000	-	13.475.000	285.000.000	300.000.000	169.724.000
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	844.125.000	-	159.780.000	200.000.000	250.000.000	479.888.000
8	Persentase realisasi anggaran						15.263.341.000

Catatan: Distribusi pendanaan masing-masing substansi

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Upaya pemantauan/monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program kegiatan tetap berjalan sesuai perencanaan dan juga memberikan informasi apabila terjadi hambatan serta masukkan untuk mencari solusi pemecahan masalah. Pemantauan dilakukan secara bertahap, harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan menggunakan aplikasi e-monev DJA, e-monev Bappenas, dan e-performance, OMSPAN, Simponi, SIMKA, Pcare Vaksinasi dan Sinkarkes.

B. Evaluasi

Upaya untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan atas pelaksanaan pemantauan capaian indikator kinerja secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). Dengan melibatkan lintas sektor, lintas program dibandara, pelabuhan dan wilayah untuk evaluasi eksternal, evaluasi internal melibatkan pemegang program setiap substansi dan kepala wilayah kerja.

Evaluasi juga dapat dilakukan dengan rekonsiliasi data yang ada aplikasi Simponi dan Sinkarkes untuk dokumen kesehatan, aplikasi Simponi dan aplikasi Saiba untuk rekonsiliasi realisasi penerimaan negara bukan pajak. Validasi data manual layanan vaksinasi Covid-19 dengan data input Pcare.

C. Pengendalian

Upaya pengendalian pelaksanaan program kegiatan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh kepala satker selaku kuasa pengguna anggaran dengan memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara bertahap, mengambil kebijakan upaya pemecahan masalah agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan dalam mencari solusi permasalahan adalah identifikasi masalah setiap substansi, menetapkan/merevisi SOP sebagai pedoman teknis pelaksanaan program.

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekejarantinahan Kesehatan Kelas I Manado Tahun 2020-2025 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Balai Kekejarantinahan Kesehatan Kelas I Manado dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Subbag, Substansi BKK Kelas I Manado mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi secara periodic selama 5 (lima) tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua substansi di lingkungan BKK Kelas I Manado oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Manado ini memberikan kontribusi dukungan manajemen dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pengendalian faktor risiko kesehatan di pintu masuk wilayah/negara khususnya dan Pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan, kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan
(dimasukkan semua indicator dari awal sampai revisi)

Tabel 3. Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan

IKK	Target						Anggaran					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks deteksi dini factor risiko penyakit dipintu masuk negara	1.646.860	1.915.806	0.8	0.99	0.99	0.99	880.901.000	2.729.812.000	2.148.819.000	2.217.044.000	892.934.000	866.222.000
Persentase faktor risikopenyakit dipintu masuk yang dikendalikan padaorang, barang dan Lingkungan	90%	95%	97%	97%	97%	97%	220.245.000	449.701.000	686.270.000	951.308.000	1.685.361.000	815.202.000
Indek pengendalian dipintu masuk	85%	90%	0.74	0.90	0.90	0.90	220.206.000	442.669.000	394.813.000	11.320.000	508.140.000	144.482.000
Nilai Kinerja Anggaran	80	83	85	86	86	86	5.064.754.000	203.624.000	355.533.000	542.598.000	520.358.000	229.444.000
Nilai Indikator Kinerja Anggaran	80%	93	93	93	93	93	4.220.000.000	2.729.812.000	11.216.986.000	10.769.863.000	11.716.066.000	131.026.000
Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker	70	72	75	76	76	76	629.000	449.701.000	4.176.299.000	7.045.347.000	7.045.372.000	169.724.000
Persentase ASN yangditingkatkan kompetensinya	45%	60	80%	80%	80%	80%	844.125.000	442.669.000	14.991.000	423.716.000	851.412.000	479.888.000
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas ditindaklanjuti	-	-	-	92,5%	92,5%	-	-	203.624.000	-	-	-	-
Persentase realisasi anggaran	-	-	-	95%	96%	96%	-	-	-	-	1.966.068.000	15.263.341.000

Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

Tabel 4. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	Deteksi faktor risiko dipintu masuk negara/wilayah melalui pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dari nilai score maksimal dikurang score minimal	Laporan harian (jumlah penumpang, rekapan Gendec, COP,PHQC,dan ijin angkut jenasah) data kunjungan poliklinik, skrinning HIV/TB, situasi khusus, rujukan, laik terbang, ijin angkut orang sakit, vaksinasi/ICV, pemeriksaan awak kapal/crew pesawat (ICV personil kedatangan), pengawasan TTU, TPM, ISPAB dan rekapitulasi hasil vektor
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam 1 tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di bagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	Data faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indek pengendalian dipintu masuk	Persentase faktor risiko kesehatan(KLB,Bencana, pengawasan sanitasi dan pengendalian vektor) dipintu masuk negara/wilayah	Berdasarkan nilai empiris score maksimal dikurang score minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data persentase SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam 2. Data persentase bandara/pelabuhan dengan indeks pinjal ≤ 1 3. Data persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (< 1) 4. Data persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi kecoa < 2 5. Data persentase bandara/pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
			<p>6. Data persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0</p> <p>7. Data persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1</p> <p>8. Data persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan</p> <p>9. Data persentase lokus TPM laik Hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan.</p> <p>10. Data persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis</p>
Nilai Kinerja Anggaran	Capaian kinerja atas rangkaian proses penggunaan anggaran mencakup pengukuran, penilaian, dalam rangka peningkatan kinerja anggaran selama setahun.	Nilai kinerja yang didapat dari nilai perolehan E-Monev DJA	E-Monev DJA, E-Monev Bapenas, E-SMART, Aplikasi Sakti
Nilai Indikator Kinerja Anggaran	Indikator yang ditetapkan oleh kementerian untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja	Nilai kinerja yang didapat dari nilai perolehan Aplikasi OMSPAN	Aplikasi OMSPAN, E-Monev DJA, E-Monev Bapenas
Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker	Hasil assesment internal/eksternal terhadap kinerja implementasi WBK satker	Menggunakan lembar kerja elektronik dengan nilai minimal 75	Laporan kegiatan setiap POKJA, WBK satker dalam setahun
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya	Jumlah pegawai yang mendapatkan 20 JPL dibagi jumlah pegawai dikali 100%	Sertifikat, surat tugas, laporan
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Persentase Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dalam satu tahun anggaran, yang ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang.	Jumlah rekomendasi yang sudah tuntas ditindak lanjuti dibagi dengan rekomendasi temuan dikali 100.	Berita acara penyelesaian tindak lanjut LHP BPK.

<p>Persentase Realisasi Anggaran</p>	<p>Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan</p>	<p>Disajikan dengan basis kas</p>	<p>Kas atau setara kas yang diterima atau dibayarkan.</p>
--------------------------------------	--	-----------------------------------	---

Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program

Tabel 5. Matriks Strategi Pencapaian Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan kekarantinaaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di pintu masuk negara	Meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara dan Pelabuhan serta lintas sektor dan lintas program	1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel. Laut Likupang 2. Wilker Pel. Laut Manado 3. Wilker Pel. Laut Siau 4. Wilker Pel. Laut Tahuna 5. Wilker Pel. Laut Petta 6. Wilker Pel. Laut Lirung 7. Wilker Pel. Laut Melonguane 8. Wilker Pel. Laut Marore 9. Wilker Pel. Laut Miangas	2023 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel. Laut Likupang 2. Wilker Pel. Laut Manado 3. Wilker Pel. Laut Siau 4. Wilker Pel. Laut Tahuna 5. Wilker Pel. Laut Petta 6. Wilker Pel. Laut Lirung 7. Wilker Pel. Laut Melonguane 8. Wilker Pel. Laut Marore 9. Wilker Pel. Laut Miangas	Koordinasi LP/LS	DIPA BKK KELAS I MANADO
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang dan lingkungan	Meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara dan Pelabuhan serta lintas sektor dan lintas program	1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel. Laut Likupang 2. Wilker Pel. Laut Manado	2023: 1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel. Laut Likupang 2. Wilker Pel. Laut Manado	Koordinasi LP/LS	DIPA BKK KELAS I MANADO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
				3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas	3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas		
		Indek pengendalian dipintu masuk	Meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara dan Pelabuhan serta lintas sektor dan lintas program	1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane	2023 :1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore	Koordinasi LP/LS	DIPA BKK KELAS I MANADO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
				8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas	9. Wilker Pel.Laut Miangas		
		Nilai Kinerja Anggaran	Melaksanakan realisasi anggaran sesuai RPK dan RPD	1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1.Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6.Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas	2023 :1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1.Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6.Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas	Koordinasi internal (setiap substansi dan subbag adum)	DIPA BKK KELAS I MANADO
		Nilai Indikator Kinerja Anggaran	Melaksanakan realisasi anggaran sesuai RPK dan RPD	1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1.Wilker Pel.Laut Likupang	2023 :1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1.Wilker Pel.Laut Likupang	Koordinasi internal (setiap substansi dan subbag adum)	DIPA BKK KELAS I MANADO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
				2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas	2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas		
		Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker	Mengimplementasi kan kinerja dan inovasi WBK pada setiap pokja	1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung	2023 :1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane	Koordinasi antar pokja ,lintas sektor/lintas program dan Es-1	DIPA BKK KELAS I MANADO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
				7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas	8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas		
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Melibatkan seluruh staf untuk mengikuti pelatihan minimal 20 JPL dalam setahun	1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas	2023 :1 Bandara (Kantor Induk) dan 9 wilker yaitu : 1. Wilker Pel.Laut Likupang 2. Wilker Pel.Laut Manado 3. Wilker Pel.Laut Siau 4. Wilker Pel.Laut Tahuna 5. Wilker Pel.Laut Petta 6. Wilker Pel.Laut Lirung 7. Wilker Pel.Laut Melonguane 8. Wilker Pel.Laut Marore 9. Wilker Pel.Laut Miangas	Koordinasi Internal	DIPA BKK KELAS I MANADO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		Persentase rekomendasi pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti	Koordinasi dengan eselon 1 dan itjen Kemenkes	BKK Kelas I Manado	2023	Koordinasi dan Konsultasi	DIPA BKK KELAS I MANADO
		Persentase Realisasi Anggaran	Konsistensi RPK-RPD secara periodik dalam satu tahun..	BKK Kelas I Manado	2023	Monev DJA, Monev Sakti, Monev SMART	DIPA BKK KELAS I MANADO